



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

WASPADA GELOMBANG PHK INDUSTRI TPT DAN ALAS KAKI

Hilma Meilani

Analisis Legislatif Ahli Muda
hilma.meilani@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) serta alas kaki di Indonesia sedang mengalami kinerja yang melambat. Hal ini dikarenakan menurunnya utilisasi di sektor industri serat (20%), *spinning* (30%), *weaving* dan *knitting* (50%), garmen (50%), pakaian bayi (20-30%), dan alas kaki (49%). Beberapa perusahaan di sektor tersebut sudah ada yang memotong jam kerjanya menjadi 3-4 hari, dari yang semula 7 hari kerja.

Menurut data Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), total tenaga kerja di industri produk tekstil (garmen) yang kehilangan pekerjaan atau terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sampai dengan awal November 2022 mencapai 79.316 orang dari 111 perusahaan, dan sebanyak 16 perusahaan telah menutup operasi produksinya. Selama periode Oktober-November 2022, jumlah pengurangan tenaga kerja di industri produk tekstil bertambah sebanyak 15.316 orang.

Industri alas kaki di Indonesia telah melakukan PHK sebanyak 25.700 pekerja sejak Juli 2022 hingga akhir Oktober 2022. Hal ini dipicu atas penurunan drastis permintaan ekspor sejak Juli 2022. PHK terjadi karena penurunan permintaan sebesar 45 persen sejak Juli 2022 hingga Oktober 2022 sehingga produksi November-Desember 2022 mengalami penurunan hingga 51 persen. Industri alas kaki di Indonesia berorientasi ekspor sehingga ketika terjadi penurunan permintaan ekspor, pengusaha tidak bisa mempertahankan tenaga kerjanya. Akibat kondisi ekonomi global yang melemah, terutama di negara-negara tujuan ekspor, penurunan ekspor industri alas kaki Indonesia mencapai rata-rata 50%, bahkan di beberapa perusahaan mencapai 70%. Dampak penurunan tersebut dikhawatirkan akan diikuti oleh gelombang PHK besar-besaran selanjutnya pada akhir tahun ini ataupun awal 2023.

Sampai dengan semester I 2023, permintaan diperkirakan masih akan turun, rata-rata 50%. Hal tersebut disebabkan negara-negara di Eropa dan Amerika mengalami perlambatan ekonomi dan inflasi yang tinggi sehingga membuat perilaku konsumen berubah. Apalagi biaya energi dan biaya kebutuhan makan juga semakin tinggi sehingga lebih mengutamakan kebutuhan primer.

Langkah-langkah mitigasi yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk menghadapi tekanan dan risiko global antara lain, adalah: *Pertama*, mengupayakan pencarian pasar baru untuk ekspor bagi sektor industri dengan mencoba membuka akses untuk pasar ke Amerika Latin dan Selatan, Afrika, negara-negara Timur Tengah, dan Asia. *Kedua*, penguasaan pasar dalam negeri, dengan memperkuat dan mendorong promosi dan kerja sama lintas sektoral agar program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) semakin tumbuh. *Ketiga*, memacu penguatan daya saing industri dengan kemudahan akses bahan baku, penguatan ekosistem usaha, dan sistem produksi. Kemenperin membentuk Satuan Tugas Pengamanan Krisis Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki dengan tugas utama menginventarisasi industri TPT dan alas kaki yang terdampak oleh krisis perekonomian global,

serta permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya, satgas menyusun rencana aksi dan strategi mitigasi berdasarkan inventarisasi permasalahan, dan berkoordinasi dengan K/L terkait dalam pelaksanaan strategi mitigasi yang diambil tersebut.

Pemerintah perlu mengambil langkah cepat untuk menyelamatkan industri garmen dan alas kaki. Beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah untuk membantu agar pabrik-pabrik di industri tersebut tetap bisa bertahan di antaranya adalah mengurangi beban utilitas dengan memberikan diskon listrik di beban puncak, memberikan kebijakan insentif dan relaksasi bagi pelaku industri yang terkena dampak pandemi dan krisis global, serta melakukan pembatasan impor pakaian jadi untuk mengamankan pasar dalam negeri karena menurunnya permintaan ekspor. Insentif Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 yang ditanggung pemerintah (DTP) pernah diberikan pemerintah selama pandemi Covid-19 untuk mengurangi beban dunia usaha, namun saat ini pemerintah hanya memberikan insentif untuk korporasi di sektor manufaktur, antara lain pembebasan PPh Pasal 22 dan diskon angsuran PPh 25.

Selain itu, diperlukan fleksibilitas kebijakan dari pemerintah terutama untuk industri TPT dan alas kaki berorientasi ekspor dengan beban tenaga kerja yang besar. Fleksibilitas yang diperlukan misalnya dengan pengurangan jam kerja dari 40 jam per minggu menjadi 30 jam per minggu agar pelaku industri bisa meminimalisir PHK. Fleksibilitas tersebut diperlukan secara temporer selama ketidakpastian ekonomi global masih berlangsung dan harus dievaluasi terus secara berkala.

Atensi DPR

Penurunan kinerja dan gelombang PHK karyawan industri TPT dan alas kaki perlu mendapat perhatian oleh DPR RI, khususnya Komisi VII DPR RI yang membidangi sektor industri. Dari sisi pengawasan, Komisi VII DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk melakukan langkah-langkah mitigasi bagi pelaku industri yang terkena dampak pandemi dan krisis global. Pemerintah perlu memberikan kebijakan insentif dan relaksasi kepada industri TPT dan alas kaki, dan membuat kebijakan yang dapat meningkatkan permintaan pasar domestik. Selain itu, diperlukan fleksibilitas kebijakan dari pemerintah untuk industri TPT dan alas kaki yang berorientasi ekspor dengan beban tenaga kerja yang besar, agar kinerja industri TPT dan alas kaki dapat meningkat dan meminimalisir PHK di sektor industri.

Sumber

ekonomi.bisnis.com, 17 November 2022;
Harian Kontan, 28 November 2022;
 kemenperin.go.id, 8 November 2022; dan
Kompas, 28 November 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



[@puslitbkd_official](https://www.instagram.com/puslitbkd_official)



EDITOR

Polhukam
 Simela Victor M.
 Prayudi
 Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang
 Sri Nurhayati Q.
 Rasbin
 Rafika Sari
 Eka Budiyantri
 Dewi Wuryandani

Kesra
 Achmad Muchaddam F.
 Yulia Indahri
 Rahmi Yuningsih

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
 Sita Hidriyah
 Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
 Teddy Prasetiawan
 T. Ade Surya
 Masyithah Aulia A.
 Yosephus Mainake

Mohammad Teja
 Nur Sholikah P.S.
 Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022